

Identifikasi Kondisi Eksisting Permukiman Kumuh Berdasarkan Konsep *Liveable Settlement* pada Desa Kedungrejo

Della Kusumaning Putri, Hertiar Idajati

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

e-mail: hertiari_idajati@urplan.its.ac.id

Abstrak—Desa Kedungrejo khususnya Dusun Kalimati yang berada di kawasan pesisir Kecamatan Muncar telah ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh prioritas pertama Kabupaten Banyuwangi menurut Surat Keputusan Bupati tahun 2018 dan RP2KPKP tahun 2020. Namun, seiring banyaknya program permukiman kumuh yang telah digalakkan, status permukiman kumuh Desa Kedungrejo berganti menjadi permukiman tidak kumuh yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Bupati tahun 2021. Perubahan kualifikasi tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengidentifikasi apakah kondisi eksisting permukiman pesisir Dusun Kalimati Desa Kedungrejo sudah sesuai dengan konsep *liveable settlement* yang menjadi visi RP2KPKP Kabupaten Banyuwangi. Teknik analisis yang digunakan dalam proses identifikasi adalah statistik deskriptif dengan output berupa persentase kondisi eksisting masing-masing sub variabel *liveable settlement*. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner dan observasi. Proses identifikasi dilakukan dengan membagi sub variabel *liveable settlement* dalam 2 kategori, yakni sub variabel bersifat personal dan sub variabel bersifat publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 sub variabel personal, 2 diantaranya memiliki persentase kategori rendah terbanyak yaitu sistem pengolahan air limbah dan pendapatan per bulan masyarakat. Sedangkan dari 23 sub variabel publik, 9 diantaranya memiliki persentase kategori rendah terbanyak antara lain lebar jalan lingkungan, jenis drainase, ketersediaan proteksi kebakaran, jumlah RTH/taman publik, luas RTH/taman publik, radius jangkauan pelayanan SMP, ketersediaan angkutan umum, kegiatan sistem keamanan lingkungan, dan keaktifan organisasi nelayan.

Kata Kunci—Kawasan Pesisir, Kondisi Eksisting, Konsep *Liveable Settlement*, Permukiman Kumuh.

I. PENDAHULUAN

KAWASAN pesisir merupakan lokasi yang sangat strategis untuk sektor perekonomian, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan di kawasan tersebut. Lebih dari 14 juta masyarakat atau kurang lebih 7,5% dari total masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada kegiatan yang ada di kawasan pesisir [1]. Tidak heran jika masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan tersebut cenderung memilih kawasan pesisir sebagai tempat tinggal, yang pada akhirnya membentuk suatu kawasan permukiman untuk mendukung mata pencaharian dan kebutuhan hidupnya. Jumlah masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir mencapai 161 juta jiwa atau sekitar 60% dari 250 juta masyarakat Indonesia dan tersebar di 10.639 desa [2]. Namun pada umumnya, permukiman pesisir memiliki kondisi tempat tinggal yang kurang baik [3].

Alasannya karena permukiman di kawasan pesisir selalu identik dengan kondisi kumuh. Masalah permukiman kumuh di kawasan pesisir menjadi ukuran tingkat kualitas hidup yang rendah yang salah satunya dapat dilihat dari bentuk fisik permukiman. Permukiman kumuh identik dengan minimnya fasilitas, sarana dan prasarana serta dapat dikategorikan dalam rumah yang tidak layak huni [4].

Kondisi permukiman kumuh dan tidak layak huni terutama yang berada di kawasan pesisir timbul karena mata pencaharian masyarakat yang notabene sebagai nelayan memiliki kemampuan sumberdaya finansial yang rendah [5]. Secara langsung hal tersebut akan mengurangi perhatian masyarakat nelayan di dalam memperbaiki dan memelihara kualitas rumah. Permasalahan terkait permukiman kumuh dan tidak layak huni di kawasan pesisir, nyatanya juga dialami oleh Kabupaten Banyuwangi.

Menurut dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Banyuwangi tahun 2020, Kecamatan Muncar khususnya Desa Kedungrejo yang berada di pesisir Banyuwangi telah dinobatkan sebagai prioritas utama penanganan permukiman kumuh skala kabupaten [6]. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/159/KEP/429.011/2018, permukiman Desa Kedungrejo tergolong dalam kualifikasi kumuh B1/2 [7]. Artinya, permukiman di desa tersebut berada pada kondisi kumuh sedang dengan status kondisi tanah legal dan terdapat nilai pertimbangan lain yang tinggi yaitu berada di kawasan PPP Muncar. Permukiman kumuh tersebut, tepatnya berada Dusun Kalimati yang meliputi 5 RT yakni RT 01 RW 01, RT 02 RW 01, RT 01 RW 02, RT 01 RW 03, dan RT 02 RW 03.

Kondisi permukiman kumuh Desa Kedungrejo menurut Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2022, yaitu sebanyak 2.312 unit rumah dari 7.217 unit rumah dalam satu desa dinyatakan sebagai bangunan tidak teratur dan 519 unit rumah lainnya dinyatakan tidak layak huni [8]. Selanjutnya, terdapat permasalahan drainase yang tersumbat dan limpasan air hujan sehingga mengakibatkan daerah genangan seluas 1,59 Ha dengan frekuensi genangan lebih dari 1 kali dalam setahun. Kondisi tersebut nyatanya belum mampu mewujudkan visi penataan lingkungan permukiman Kabupaten Banyuwangi yakni “Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan”.

Guna mewujudkan visi tersebut, sejak tahun 2019 pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggalakkan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di

Tabel 1.
Variabel penelitian

Indikator	Variabel	Sub Variabel
Sub Variabel Personal		
Fisik	Kondisi Hunian	Kepadatan hunian Jenis bangunan Penghawaan/ventilasi
Utilitas	Jaringan Persampahan Jaringan Air Limbah Jaringan Air Bersih	Sistem jaringan persampahan Sistem pengolahan air limbah Kuantitas air bersih Kualitas air bersih
Sosial	Jaringan Drainase Tingkat Kriminalitas Hubungan Interaksi Antar Masyarakat	Jumlah kejadian genangan Frekuensi tindak kriminalitas Konflik masyarakat
Ekonomi	Tingkat Pendapatan Aksesibilitas	Perdapatan per bulan Jarak hunian ke lokasi kerja
Sub Variabel Publik		
Utilitas	Jaringan Persampahan Jaringan Drainase Jaringan Jalan	Jarak bebas TPS dari hunian Jenis drainase Kondisi jalan lingkungan Lebar jalan lingkungan
Fasilitas	Proteksi Kebakaran Ruang Terbuka Publik Fasilitas Pendidikan Fasilitas Kesehatan Fasilitas Transportasi Fasilitas Perbelanjaan Fasilitas Nelayan	Ketersediaan proteksi kebakaran Jumlah ruang terbuka publik Luas ruang terbuka publik Radius jangkauan pelayanan TK Radius jangkauan pelayanan SD Radius jangkauan pelayanan SMP Radius jangkauan pelayanan SMA Radius jangkauan pelayanan posyandu Radius jangkauan pelayanan puskesmas pembantu Ketersediaan transportasi umum Radius jangkauan pelayanan toko/warung Ketersediaan pasar lingkungan Lokasi area penjemuran ikan Radius jangkauan pelayanan TPI Ukuran tambatan perahun Kapasitas dermaga perapatan perahu
Sosial	Layanan Keamanan Hubungan Interaksi Antar Masyarakat	Intensitas kegiatan layanan keamanan Intensitas kegiatan sosial Keaktifan organisasi nelayan

Desa Kedungrejo. Hingga tahun 2021, terdapat 3 program pencegahan permukiman kumuh dan 6 program peningkatan kualitas permukiman kumuh yang telah dilaksanakan di Desa Kedungrejo menurut RP2KPKP. Total anggaran biaya yang dialokasikan untuk kedua program tersebut sebesar 4,8 Milyar yang bersumber dari APBD dan APBN [6].

Kedua program tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik pada perubahan kondisi permukiman pesisir Desa Kedungrejo, jika ditinjau dari Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/22/KEP/429.011/2021. Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa Desa Kedungrejo tidak lagi termasuk dalam kategori perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2021 [9].

Perubahan kategori tersebut, menjadi dasar bagi peneliti untuk mengidentifikasi “Bagaimana kondisi eksisting permukiman kumuh Desa Kedungrejo berdasarkan konsep *liveable settlement* yang menjadi visi penataan lingkungan permukiman Kabupaten Banyuwangi?”. Analisis dalam penelitian ini merujuk pada preferensi penghuni yaitu masyarakat Desa Kedungrejo, khususnya Dusun Kalimati. Hal ini didasari oleh teori “Good City Form” dari Kevin Lynch, yang menyatakan bahwa suatu lokasi dinyatakan layak huni (*liveable*) apabila mampu mengakomodasikan

kebutuhan masyarakat dalam hidup dan berkehidupan [10].

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah rasionalistik, yakni pendekatan yang berdasarkan atas fakta-fakta empiris dan teori yang berkaitan [11]. Fakta empiris dan teori dikumpulkan melalui literatur maupun dokumen yang relevan dan masih berlaku untuk memberikan pemaknaan serta pemahaman yang lebih rinci. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yakni penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya.

B. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 5 indikator, yaitu fisik, utilitas, fasilitas, sosial, dan ekonomi. Setiap indikator memiliki beberapa variabel yang dikerucutkan menjadi sub variabel. Sub variabel *liveable settlement* yang digunakan sebanyak 35 dan telah dikelompokkan menjadi 2 kategori, yakni sub variabel personal dan sub variabel publik. Berikut ini adalah sub variabel yang digunakan dalam penelitian, diberikan pada Tabel 1.

C. *Populasi dan Sampel*

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di RT 01 RW 01, RT 02 RW 01, RT 01 RW 02, RT 01 RW 03, dan RT 02 RW 03 Dusun Kalimati Desa Kedungrejo yang berjumlah 381 KK. Sedangkan, metode sampling yang digunakan ada 2 yakni Probability Sampling yang berjenis teknik Stratified Radom Sampling untuk sub variabel personal dan Non-Probability Sampling yang berjenis Purposive Sampling untuk sub variabel publik. Pengkategorian tersebut dikarenakan sub variabel personal akan menghasilkan jawaban yang berbeda tergantung kondisi yang dirasakan setiap responden. Sedangkan, sub variabel publik akan menghasilkan jawaban yang homogen dikarenakan sarana prasana yang digunakan sama.

Stratified random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan pada elemen populasi. Elemen populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan (stratifikasi) berdasarkan karakter yang melekat padanya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} \tag{1}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Toleransi Kesalahan (dalam persen), penelitian ini menggunakan toleransi kesalahan 10%.

$$n = \frac{381}{1+(381 \times 0,01)} = 80KK \tag{2}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan total sampling sebanyak 80 KK yang tersebar pada 5 wilayah RT. Menurut Stratified Random Sampling, setiap responden pada masing-masing RT memiliki proporsi sampling yang berbeda sesuai dengan jumlah penduduk. Maka, dilakukan penghitungan kembali menggunakan rumus Stratified Random Sampling setelah mendapatkan total responden untuk menghasilkan proporsi sampling pada masing-masing RT.

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n \tag{3}$$

Keterangan:

ni = Ukuran Sampel i

Ni = Ukuran Populasi i

N = Ukuran Populasi Total

n = Ukuran Sampel Total

Berdasarkan rumus tersebut, kemudian didapatkan hasil proporsi sampling pada setiap RT, diberikan pada Tabel 2.

Sedangkan, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan ini misalnya orang tersebut dianggap yang paling mengerti apa tujuan dari penelitian ini, dan orang tersebut bertindak sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek/situasi sosial yang diteliti [12]. Pihak yang terpilih sebagai responden Non-Probability Sampling adalah seluruh ketua RT pada 5 wilayah lokasi studi, antara lain ketua RT 01 RW 01, RT 02 RW 01, RT 01 RW 02, RT 01 RW 03, RT 02 RW 03.

Tabel 2.
Proporsi sampling pada setiap RT

Wilayah Penelitian	Proporsi Responden (KK)
RT 01 RW 01	11
RT 02 RW 01	13
RT 01 RW 02	18
RT 01 RW 03	18
RT 02 RW 03	20
Total	80

D. *Metode Pengumpulan Data*

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer, yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan observasi. Kuesioner disebarkan kepada masyarakat Dusun Kalimati yang bertempat tinggal di RT 01 RW 01, RT 02 RW 01, RT 01 RW 02, RT 01 RW 03, dan RT 02 RW 03 sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan pada masing-masing RT.

E. *Mengidentifikasi Kondisi Eksisting Sub Variabel Liveable Settlement pada Permukiman Pesisir Desa Kedungrejo Berdasarkan Preferensi Penghuni*

Identifikasi kondisi eksisting sub variabel *liveable settlement* pada permukiman pesisir Desa Kedungrejo berdasarkan preferensi penghuni, menggunakan metode pengumpulan data primer berupa penyebaran kuesioner dan observasi. Penggunaan metode pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner dan observasi, berdasarkan pengelompokan sub variabel penelitian. Dari 35 sub variabel yang digunakan, 12 diantaranya termasuk dalam kelompok sub variabel personal dan 23 sisanya termasuk dalam kelompok sub variabel publik.

Penyebaran kuesioner digunakan untuk mengetahui kondisi eksisting sub variabel *liveable settlement* yang bersifat personal, sehingga setiap responden memiliki jawaban beragam. Sedangkan, observasi digunakan untuk mengetahui kondisi eksisting sub variabel *liveable settlement* yang bersifat publik. Hasil observasi kemudian divalidasi melalui penyebaran kuesioner kepada ketua RT 01/01, 02/01, 01/02, 01/03, dan 02/03.

Hasil kuesioner dan observasi akan diolah secara kuantitatif menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, untuk menghasilkan persentase kondisi eksisting dari masing-masing sub variabel. Statistik deskriptif atau statistik deduktif adalah bagian dari statistik mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami [13]. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata lain, statistik deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif (jika ada) hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada. Didasarkan pada ruang lingkup bahasannya statistik deskriptif mencakup:

1. Distribusi frekuensi beserta bagianbagiannya seperti:(a)Grafik distribusi (histogram, poligon frekuensi, dan ogif); (b)Ukuran nilai pusat (rata-rata, median, modus, kuartil dan sebagainya); (c)Ukuran dispersi (jangkauan, simpangan rata-rata, variasi, simpangan baku, dan sebagainya); (d) Kemencengan dan keruncingan kurva.
2. Angka indeks.

3. *Times series*/deret waktu atau berkala.

4. Korelasi dan regresi sederhana.

Jenis teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif harus sesuai dengan jenis data atau variabel berdasarkan skala pengukurannya, yaitu nominal, ordinal, atau interval/rasio. Dalam sasaran ini, skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti adalah ordinal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Desa Kedungrejo memiliki luas $\pm 10.351,57$ Ha yang terdiri dari 5 dusun yakni Dusun Krajan, Dusun Kalimati, Dusun Muncar, Dusun Sampangan, dan Dusun Stoplas. Dusun Krajan memiliki 5 RW dan 79 RT, Dusun Kalimati memiliki 5 RW dan 20 RT, Dusun Muncar memiliki 5 RW dan 17 RT, Dusun Sampangan memiliki 3 RW dan 12 RT, Dusun Stoplas memiliki 4 RW dan 15 RT.

Dari 5 dusun yang ada, Dusun Kalimati adalah salah satu dusun yang memiliki nilai strategis kawasan lebih tinggi dibandingkan dusun lain karena lokasi sangat strategis dekat dengan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar. Aktivitas di PPP Muncar, ternyata mempengaruhi kondisi kawasan permukiman di sekitarnya, terutama pada RT 01 RW 01, RT 02 RW 01, RT 01 RW 02, RT 01 RW 03, dan RT 02 RW 03. Hingga tahun 2018, permukiman di sekitar PPP Muncar termasuk dalam kawasan kumuh B1/2 dan menjadi prioritas pertama Kabupaten Banyuwangi.

Namun masuknya program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh pada tahun 2019, membuat perubahan yang sangat signifikan terhadap kondisi kawasan permukiman Dusun Kalimati saat ini, terutama dari segi fisik, utilitas, fasilitas, sosial, dan ekonomi. Pada Gambar 1 adalah beberapa gambaran kondisi eksisting kawasan permukiman Dusun Kalimati Desa Kedungrejo.

B. Identifikasi Kondisi Eksisting Sub Variabel *Liveable Settlement* Pada Permukiman Pesisir Desa Kedungrejo Berdasarkan Preferensi Penghuni

Proses identifikasi kondisi eksisting setiap sub variabel *liveable settlement* pada permukiman Desa Kedungrejo, dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dari setiap RT yang berjumlah 80 KK. Jawaban kuesioner selanjutnya diolah menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan output berupa persentase kondisi eksisting setiap sub variabel pada masing-masing RT. Sebelumnya, 35 sub variabel *liveable settlement* yang digunakan telah dibagi menjadi 2 kategori yakni sub variabel yang bersifat personal dan bersifat publik.

Sub variabel *liveable settlement* yang bersifat personal dari setiap RT, memiliki persentase kondisi eksisting yang beragam. Pada indikator fisik, kepadatan hunian dan jenis bangunan berada dalam kategori baik pada setiap RT. Sedangkan, penghawaan/ventilasi hunian memiliki luas bukaan yang berbeda-beda namun secara keseluruhan didominasi oleh luas bukaan lebih dari 5% dari luas lantai hunian dengan persentase lebih dari 50% pada masing-masing RT, ditunjukkan pada Gambar 2. Indikator selanjutnya adalah utilitas dengan 5 sub variabel personal.



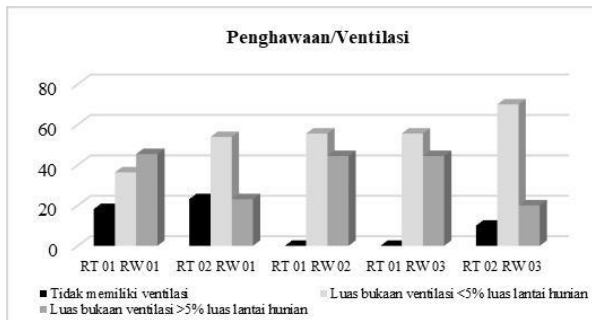
Gambar 1. Peta kondisi eksisting sub variabel *liveable settlement* di setiap RT.

Sub variabel sistem pengangkutan sampah, kuantitas air minum, dan kualitas air minum berada pada kategori yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat di setiap RT. Sedangkan, sistem pembuangan air limbah di setiap RT berada pada kategori buruk kecuali RT 02 RW 03 dan frekuensi kejadian genangan air di beberapa RT berada pada kategori buruk. lebih dari 70% responden di setiap RT membuang air limbah rumah tangga secara langsung tanpa diolah melalui saluran drainase lingkungan, untuk kemudian dialirkan ke sungai dan laut, ditunjukkan pada Gambar 3. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab drainase tidak berfungsi dengan baik dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Sebanyak 60% lebih responden di setiap RT tidak mengalami kejadian genangan air, kecuali di RT 01 RW 03, ditunjukkan pada Gambar 4. Kondisi tersebut terjadi saat hujan lebat turun.

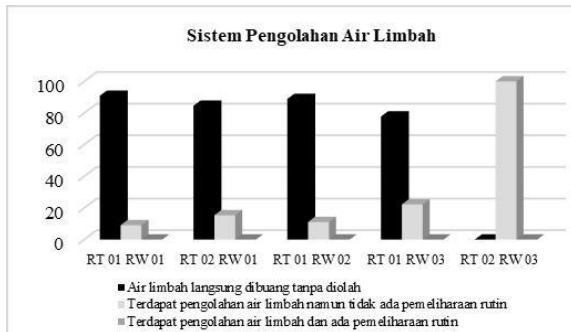
Untuk seluruh sub variabel personal pada indikator sosial, yakni frekuensi tidak kriminalitas dan konflik masyarakat 100% berada pada kategori baik.. Meskipun pernah terjadi tindak kriminalitas dan konflik antar masyarakat, namun bukan merupakan kejadian berat. Lingkungan hunian termasuk dalam kategori aman karena tidak pernah terjadi tindak kriminalitas dan konflik masyarakat yang berarti di setiap RT, ditunjukkan pada Gambar 5 dan Gambar 6.

Selanjutnya, kondisi eksisting sub variabel personal pada indikator ekonomi cenderung beragam terutama pada pendapatan. Mata pencaharian masyarakat pada 5 RT yang menjadi wilayah penelitian didominasi oleh nelayan dan wirausaha bidang perikanan dengan pendapatan yang tidak menentu tergantung iklim dan cuaca. Sehingga, lebih dari 15% responden di setiap RT memiliki pendapatan di bawah UMK Banyuwangi 2021 (Rp2.314.278) dan lebih dari 30% responden di setiap RT memiliki pendapatan setara dengan UMK Banyuwangi 2021, ditunjukkan pada Gambar 7. Sedangkan, sub variabel aksesibilitas ke tempat kerja 100% berada pada kategori baik, yakni kurang dari 10 km.

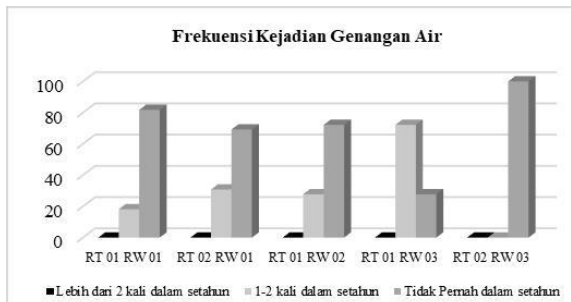
Sub variabel *liveable settlement* yang bersifat publik dari setiap RT, juga memiliki persentase kondisi eksisting yang beragam. Pada indikator utilitas, hanya sub variabel jarak bebas TPS dari hunian yang 100% berada pada kategori baik



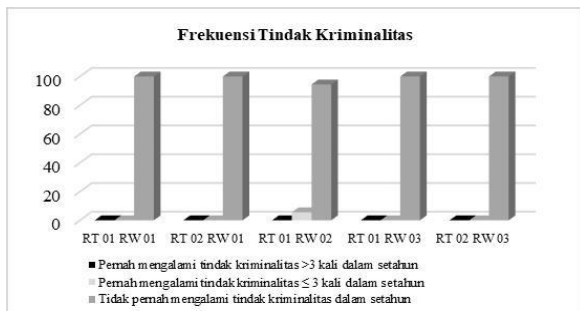
Gambar 2. Persentase kondisi eksisting penghawaan/ ventilasi.



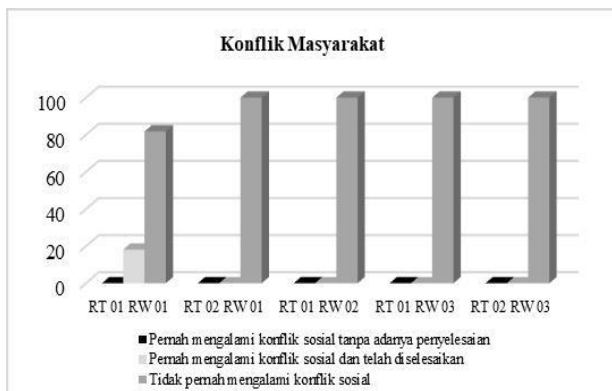
Gambar 3. Persentase kondisi eksisting sistem pengolahan air limbah.



Gambar 4. Persentase kondisi eksisting frekuensi kejadian genangan air.

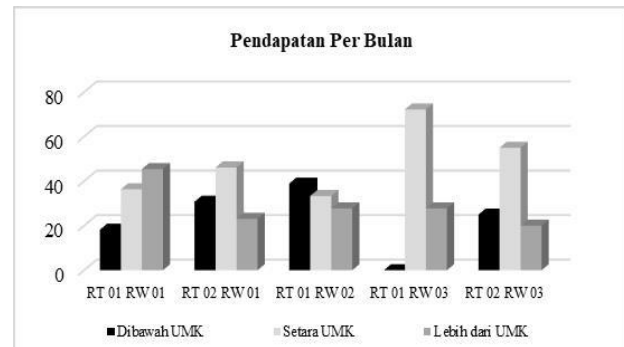


Gambar 5. Persentase kondisi eksisting frekuensi tindak kriminalitas.



Gambar 6. Persentase kondisi eksisting konflik masyarakat.

yakni lebih dari 30 m. Sedangkan, untuk sub variabel drainase di setiap RT kondisi eksistingnya berbeda-beda,

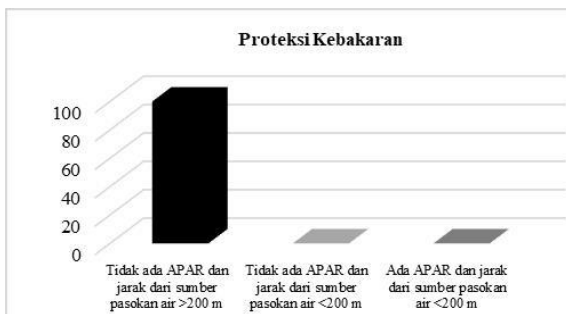


Gambar 7. Persentase kondisi eksisting pendapatan per bulan.

namun 40% adalah tidak tersedia jaringan drainase terbuka/tertutup di RT 01 RW 01 dan RT 01 RW 02 serta 40% tersedia drainase terbuka/tertutup namun tidak berfungsi dengan baik di RT 02 RW 01 dan RT 01 RW 03. Begitu pula dengan sub variabel kondisi jalan lingkungan yang berbeda di setiap RT, yaitu 40% adalah tidak tersedia jaringan drainase terbuka/tertutup di RT 01 RW 01 dan RT 01 RW 02 serta 40% tersedia drainase terbuka/tertutup namun tidak berfungsi dengan baik di RT 02 RW 01 dan RT 01 RW 03, ditunjukkan pada Gambar 8. Lalu, sub variabel lebar jalan lingkungan dan proteksi kebakaran 100% berada pada kategori buruk, yakni lebar jalan kurang dari 3,2-4 m dan tidak adanya APAR di masing-masing RT, ditunjukkan pada Gambar 9.

Pada indikator fasilitas, sub variabel publik jumlah dan RTH/taman publik didominasi oleh kategori rendah dengan 80% wilayah penelitian tidak memiliki RTH/taman publik dan hanya 20% wilayah penelitian yang memiliki RTH/taman publik yaitu RT 02 RW 03, pada Gambar 10. RTH/taman publik berupa vertical garden yang memanfaatkan beberapa lahan warga dan masjid. Kemudian untuk radius jangkauan pelayanan TK kurang dari 500 m², SD kurang dari 1000 m², dan SMA kurang dari 3000 m² sehingga 100% berada pada kategori baik. Sedangkan radius jangkauan pelayanan SMP 100% berada pada kategori buruk yaitu lebih dari 1000 m². Radius jangkauan pelayanan puskesmas, posyandu, toko/warung, dan pasar lingkungan 100% berada pada kategori baik. Untuk sub variabel ketersediaan angkutan umum berada pada kategori kurang baik, yakni tersedia angkutan umum namun jarang dijumpai. Hal ini tidak dipermasalahakan oleh masyarakat, karena lebih memilih kendaraan pribadi dalam mobilitas sehari-hari. Pada fasilitas nelayan, sub variabel lokasi area penjemuran ikan, radius jangkauan pelayanan TPI, ukuran tambatan perahu dan kapasitas dermaga perapatan perahu 100% berada pada kategori baik dan memenuhi persyaratan.

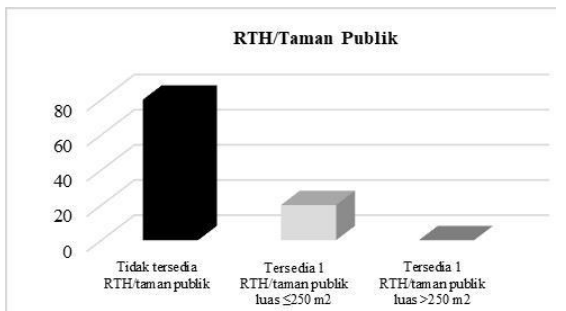
Selanjutnya pada indikator sosial, sub variabel publik yang ditunjukkan pada Gambar 11, kegiatan siskamling hanya diadakan oleh 40% wilayah penelitian pada RT 02 RW 01 serta RT 02 RW 03 dan hanya dilakukan saat momen-momen tertentu seperti bulan Ramadhan. Kemudian, untuk intensitas kegiatan sosial di setiap RT 100% berada pada kategori baik dengan intensitas kegiatan minimal 1 kali seminggu berupa kegiatan pengajian, PKK, kerja bakti, dsb. Sedangkan, untuk keaktifan organisasi nelayan 100% berada pada kategori buruk karena organisasi/kelompok nelayan Desa Kedungrejo tidak pernah melakukan pertemuan dan mengadakan kegiatan bersama. Sehingga, tidak ada wadah bagi nelayan untuk tumbuh dan berkembang.



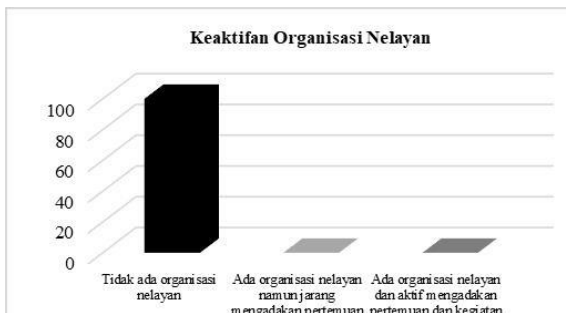
Gambar 8. Persentase kondisi eksisting ketersediaan proteksi kebakaran.



Gambar 9. Persentase kondisi eksisting lebar jalan lingkungan.



Gambar 10. Persentase kondisi eksisting RTH/taman publik.



Gambar 11. Persentase kondisi eksisting keaktifan organisasi nelayan.

IV. KESIMPULAN

Identifikasi kondisi eksisting permukiman pesisir Desa Kedungrejo bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau ketercapaian konsep *liveable settlement* sebagai visi penataan lingkungan permukiman Kabupaten Banyuwangi. Proses identifikasi menggunakan 35 sub

variabel *liveable settlement* yang dikelompokkan menjadi 2 kategori, yakni 12 sub variabel yang bersifat personal dan 23 sub variabel yang bersifat publik. Hasilnya, dari 12 sub variabel *liveable settlement* yang bersifat personal, 2 diantaranya yakni sistem pengolahan air limbah dan pendapatan per bulan masyarakat memiliki nilai persentase kondisi eksisting yang tinggi pada kategori rendah dan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Sedangkan, dari 23 sub variabel *liveable settlement* yang bersifat publik, 9 diantaranya yakni lebar jalan lingkungan, jenis drainase, ketersediaan proteksi kebakaran, jumlah RTH/taman publik, luas RTH/taman publik, radius jangkauan pelayanan SMP, ketersediaan angkutan umum, kegiatan sistem keamanan lingkungan, dan keaktifan organisasi nelayan juga memiliki nilai persentase kondisi eksisting yang tinggi pada kategori rendah dan belum sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Khoirunnisak and A. Satria, "Analisis kelembagaan dan keberlanjutan echa laut dan mane'e sebagai model pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat," *Sodality J. Sociol. Pedesaan*, vol. 4, no. 1, pp. 23-37, 2016, doi: 10.22500/sodality.v4i1.14404.
- [2] Widayatun, "Satu dekade pembangunan sumber daya manusia (kasus pulau mapur, kabupaten bintang)," *J. Kependud.*, vol. 11, no. 2, pp. 119-132, 2016.
- [3] H. M. Putri and Nurlaili, "Tata kelola pemukiman nelayan di wilayah perkotaan pesisir utara jakarta," *Bul. Ilm. Mar. Sos. Ekon. Kelaut. dan Perikan.*, vol. 4, no. 1, pp. 7-13, 2018, doi: 10.15578/marina.v4i1.2048.
- [4] E. Pradika and Sunarti, "Pengaruh pembangunan rusunawa kyai mojo terhadap penanganan permukiman kumuh di kawasan pesisir," *J. Tekno Glob.*, vol. 3, no. 1, pp. 43-55, 2014.
- [5] P. I. Christiawan, I. P. A. Citra, and M. A. Wahyuni, "Penataan permukiman kumuh masyarakat pesisir di desa sangsit," *J. Widya Laksana*, vol. 5, no. 2, pp. 52-59, 2017, doi: 10.23887/jwl.v5i2.8494.
- [6] Bupati Banyuwangi, *Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2020.
- [7] Bupati Banyuwangi, *Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/159/KEP/429.011/2018 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2018.
- [8] Bidang Cipta Karya, *Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2022*. Banyuwangi: Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi, 2017.
- [9] Bupati Banyuwangi, *Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/22/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2021.
- [10] K. Lynch, *A Theory of Good City Form*. Inggris: The MIT Press, 1981.
- [11] N. Muhadjir, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011.
- [12] Y. Yoanda, "Pelaksanaan pemberian izin lingkungan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 oleh badan lingkungan hidup di kota pekanbaru tahun 2016," *JOM FISIP*, vol. 4, no. 2, pp. 1-18, 2017.
- [13] L. Fajri, S. Sugiarto, and R. Anggraini, "Penerapan metode ipa (importance performance analysis) untuk menganalisis kepentingan dan kepuasan penumpang terhadap kualitas pelayanan bus trans koetaradja (studi kasus: koridor I keudah - darussalam)," *J. Arsip Rekayasa Sipil dan Perenc.*, vol. 2, no. 2, pp. 164-173, 2019, doi: 10.24815/jarsp.v2i2.13453.